

ketimpangan tersebut akan menurun yang menunjukkan bahwa pendapatan perkapita berbanding terbalik dengan disparitas pembangunan ekonomi atau hubungan negatif. Selanjutnya suatu saat tertentu ketimpangan akan naik kembali dan seterusnya mengalami siklus tersebut sehingga akan terjadi peristiwa yang berulang kali dan bila dilukiskan akan menggambarkan kurva U terbalik (Todaro, 2013).

Hipotesis Kuznets ini bisa dibuktikan dengan membuat grafik antara PDRB perkapita Sumatera dengan angka indeks Williamson untuk mengganti Koefisien Gini. Grafik ini mewujudkan hubungan antara PDRB perkapita (pendapatan perkapita) Sumatera dengan indeks Williamson. Dari hasil perhitungan pendapatan perkapita dan nilai indeks Williamson akan terwujud sebuah garis *trend* yang menunjukkan pada posisi mana garis *trend* tersebut dalam kurva U terbalik oleh hipotesis Kuznets.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

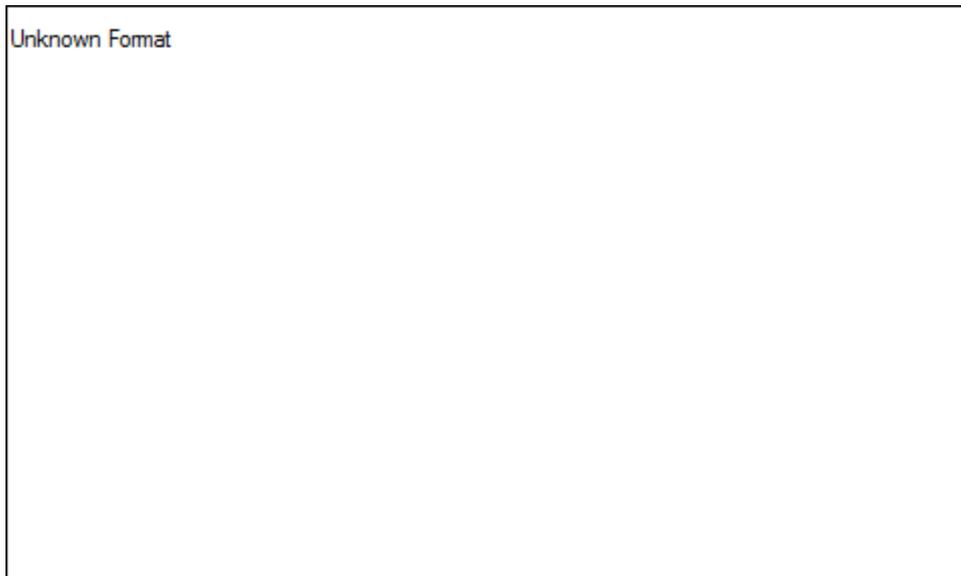
4.1.1. Deskripsi Pulau Sumatera

Pulau Sumatera merupakan salah satu pulau terbesar di Indonesia dan termasuk peringkat enam pulau terluas dunia dengan luas 443.085,65 km². Secara astronomis Pulau Sumatera berada pada bagian barat Indonesia yakni pada posisi antara 6°LU-6°LS dan antara 95°BB-109°BT. Sebelah utara Pulau Sumatera berbatasan dengan Teluk Benggala, sebelah timur dengan Selat Malaka, sebelah selatan dengan Selat Sunda, dan sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia.

Secara administrasi Pulau Sumatera terbagi menjadi sepuluh propinsi yaitu Propinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, dan Propinsi Kepulauan Riau. Sepuluh propinsi ini berdiri pada waktu yang berbeda-beda satu sama lain. Propinsi tertua adalah Propinsi Sumatera Utara dan Sumatera Selatan. Sebelum zaman reformasi, Propinsi Aceh mekar dari Sumatera Utara; Sumatera Barat, Jambi, dan Riau mekar dari Sumatera Tengah; Lampung dan Bengkulu mekar dari Sumatera Selatan. Kemudian setelah zaman reformasi Propinsi Kepulauan Bangka Belitung mekar dari Sumatera Selatan dan Kepulauan Riau mekar dari Propinsi Riau.

Penduduk Sumatera hingga tahun 2012 mencapai 52.420.320 jiwa yang merupakan mayoritas keturunan melayu. Penduduk terpadat ada di Propinsi Sumatera Utara yaitu 13.215.401 jiwa dan yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit adalah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan jumlah penduduk 1.298.169 jiwa. Berikut gambaran jumlah penduduk masing-masing propinsi di Pulau Sumatera tahun 2012:

Gambar 4.1. Grafik Jumlah Penduduk 10 Propinsi di Sumatera Tahun 2012



Sumber: BPS Propinsi Bengkulu (Diolah)

Diantara penduduk Sumatera saat ini, masih banyak terdapat penduduk miskin di masing-masing propinsi. Akan tetapi persentase jumlah penduduk miskin tersebut dari tahun ke tahun semakin menurun.

Gambar 4.2. Diagram Persentase Penduduk Miskin 10 Propinsi di Sumatera 2008-2012



Sumber: bps.go.id (Diolah)

Tabel 4.1. Share PDRB Propinsi Terhadap PDRB Pulau Sumatera Periode 2004-2012

No	Propinsi	Share PDRB Propinsi Terhadap PDRB Pulau Sumatera									Rata-rata
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
1	Aceh	11	10	9	9	8	7	7	7	7	8
2	Sumatera Utara	23	24	24	24	25	25	25	25	26	25
3	Sumatera Barat	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
4	Riau	21	21	21	21	21	21	21	21	20	21
5	Jambi	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4
6	Sumatera Selatan	13	13	13	14	14	14	14	14	14	14
7	Bengkulu	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
8	Lampung	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	Kepulauan Bangka Belitung	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
10	Kepulauan Riau	8	8	8	9	9	9	9	9	9	9
Sumatera		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Data diolah

Selain itu, dapat dilihat share PDRB masing-masing propinsi terhadap total PDRB Pulau Sumatera. Terlihat pada Tabel 4.1 bahwa penyumbang PDRB terbesar terhadap Pulau Sumatera selama periode 2004-2012 adalah Propinsi Sumatera Utara dan penyumbang terendah adalah Propinsi Bengkulu dan Kepulauan Bangka Belitung. Share Propinsi Aceh selama periode 2004-2012 semakin menurun, sebaliknya Propinsi Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau memiliki share yang makin naik. Propinsi selain itu memberikan share yang konsisten setiap tahun yaitu Propinsi Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, dan Riau (meskipun turun pada tahun 2012).

4.1.2. Hasil Perhitungan Data dan Interpensi Data

4.1.2.1. Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Perkapita

Dalam mengukur kinerja ekonomi suatu negara atau daerah maka yang sering digunakan sebagai indikator pertumbuhan ekonomi adalah Produk Domestik Bruto (PDB) untuk suatu negara dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk suatu daerah (*Region*). PDB atau PDRB tersebut merupakan keseluruhan dari nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh masing-masing daerah pada periode waktu tertentu (biasanya satu tahun).

Data dalam penelitian ini menggunakan data PDRB tahun 2004-2012 berdasarkan harga konstan tahun 2000 menurut propinsi yang diambil langsung dari situs resmi Badan Pusat Statistik. Dengan menggunakan data ini diperoleh hasil perhitungan pertumbuhan ekonomi rata-rata sepuluh propinsi di Sumatera seperti pada Gambar 4.3.

Gambar 4.3. Grafiak Persentase Pertumbuhan Ekonomi Rata-Rata 10 Propinsi di Sumatera Tahun 2004-2012



Keterangan: 1= Aceh 2= Sumatera Utara 3= Sumatera Barat
 4= Riau 4= Jambi 5= Sumatera Selatan
 6= Bengkulu 7= Lampung 9= Kep. Bangka Belitung
 10= Kepulauan Riau

Sumber: bps.go.id (Diolah)

Tabel 4.2. Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Propinsi Tahun 2004-2012

No	Propinsi	Tingkat Pertumbuhan PDRB (Ri)								
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Rata-Rata
1	Aceh	-10,12	1,56	-2,36	-5,24	-5,51	2,74	5,09	5,21	-1,08
2	Sumatera Utara	5,48	6,20	6,90	6,39	5,07	6,42	6,63	6,22	6,17
3	Sumatera Barat	5,73	6,14	6,34	6,88	4,28	5,94	6,25	6,35	5,99
4	Riau	5,41	5,15	3,41	5,65	2,97	4,21	5,04	3,55	4,42
5	Jambi	5,57	5,90	6,82	7,17	6,39	7,35	8,54	7,44	6,90
6	Sumatera Selatan	4,84	5,20	5,84	5,07	4,11	5,63	6,50	6,01	5,40
7	Bengkulu	5,82	5,96	6,44	5,76	5,62	6,11	6,45	6,60	6,05
8	Lampung	4,02	4,98	5,94	5,35	5,26	5,89	6,43	6,48	5,54
9	Kepulauan Bangka Belitung	3,47	3,99	4,54	4,60	3,74	5,99	6,46	5,72	4,81
10	Kepulauan Riau	6,57	6,78	7,01	6,63	3,52	7,19	6,66	8,21	6,57
Sumatera (R)		3,57	5,26	4,96	4,98	3,50	5,58	6,19	5,82	5,08
Indonesia		5,38	5,18	5,67	6,47	4,74	6,08	6,50	6,23	6,19

Tabel 4.3. Pendapatan Perkapita Berdasarkan Propinsi Tahun 2004-2012

No	Propinsi	Produk Domestik Regional Bruto Perkapita (Yi)									
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Rata-Rata
1	Aceh	9.873.600	9.000.918	8.872.832	8.519.078	7.938.102	7.375.069	7.365.372	7.567.255	7.797.298	8.256.614
2	Sumatera Utara	6.873.424	7.059.564	7.393.268	7.775.379	8.140.572	8.420.583	9.144.749	9.660.554	10.174.795	8.293.654
3	Sumatera Barat	6.080.535	6.385.939	6.681.012	7.006.007	7.349.876	7.552.751	8.017.893	8.419.276	8.857.299	7.372.287
4	Riau	16.642.380	17.314.743	16.832.428	17.001.150	17.552.927	17.662.955	17.647.079	17.890.604	17.929.822	17.386.010
5	Jambi	4.553.353	4.787.615	4.956.641	5.205.642	5.486.582	5.742.238	5.650.227	5.982.685	6.282.815	5.405.311
6	Sumatera Selatan	7.142.581	7.318.124	7.547.822	7.872.084	8.153.137	8.369.008	8.571.225	8.971.653	9.361.000	8.145.181
7	Bengkulu	3.805.965	3.944.929	4.154.233	4.352.651	4.495.699	4.571.881	4.861.505	5.096.207	5.356.595	4.515.518
8	Lampung	4.000.990	4.131.010	4.293.150	4.485.015	4.656.180	4.831.246	5.045.736	5.312.568	5.601.165	4.706.340
9	Kepulauan Bangka Belitung	8.219.435	8.344.386	8.301.106	8.552.415	8.810.063	8.998.913	8.898.092	9.184.164	9.437.145	8.749.524
10	Kepulauan Riau	23.916.043	23.831.861	24.302.195	24.922.141	25.478.176	25.290.115	24.462.187	24.824.821	25.659.304	24.742.983
Sumatera (Y)		7.869.419	8.024.201	8.245.667	8.508.091	8.775.338	8.923.306	9.252.091	9.649.020	10.041.507	8.809.849
Indonesia		7.385.139	7.721.312	7.973.085	8.318.470	8.663.141	8.939.591	9.347.713	9.807.900	10.290.000	8.705.150

Gambar 4.3 dan Tabel 4.2 menunjukkan bahwa persentase pertumbuhan ekonomi rata-rata antar propinsi di Sumatera relatif merata kecuali Propinsi Aceh yang memiliki persentase pertumbuhan rata-rata yang negatif. Persentase pertumbuhan rata-rata ekonomi tertinggi periode 2004-2012 adalah Propinsi Jambi yaitu sebesar 6,90 persen dan terendah Propinsi Aceh dengan kisaran -1,08 persen. Propinsi yang memiliki pertumbuhan ekonomi rata-rata diatas pertumbuhan ekonomi rata-rata Pulau Sumatera adalah Propinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, dan Kepulauan Riau. Sedangkan yang memiliki pertumbuhan ekonomi rata-rata dibawah pertumbuhan ekonomi rata-rata Pulau Sumatera adalah Propinsi Aceh, Riau, dan Kepulauan Bangka Belitung. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera sebesar 5,08 persen. Nilai ini berada dibawah pertumbuhan ekonomi rata-rata Indonesia yang mencapai 6,19 persen dari tahun 2004 sampai tahun 2012.

Selain dari sisi pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita pada Tabel 4.3 juga memperlihatkan kinerja ekonomi masing-masing propinsi di Pulau Sumatera. Pendapatan perkapita secara rata-rata dari tahun 2004 sampai tahun 2012 di Pulau Sumatera adalah sebesar 8.809.849 rupiah. Sedangkan pendapatan perkapita secara rata-rata yang paling tinggi di Pulau Sumatera adalah Propinsi Kepulauan Riau yakni sebesar 24.742.983 rupiah dan terendah adalah Propinsi Bengkulu dengan nilai sebesar 4.515.518 rupiah. Akan tetapi jika pendapatan perkapita Pulau Sumatera ini dibandingkan dengan Pendapatan perkapita Indonesia maka posisi Pulau Sumatera masih berada diatas rata-rata Indonesia, pendapatan perkapita secara rata-rata di Indonesia berkisar 8.705.150 rupiah.

4.1.2.2. Klasifikasi Daerah

Pengklasifikasian daerah (propinsi) dalam penelitian ini menggunakan alat analisis Tipologi Klassen dengan menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita masing-masing propinsi yang dibandingkan dengan

pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita Sumatera. Berdasarkan alat analisis ini maka propinsi akan diklasifikasikan menjadi empat yaitu:

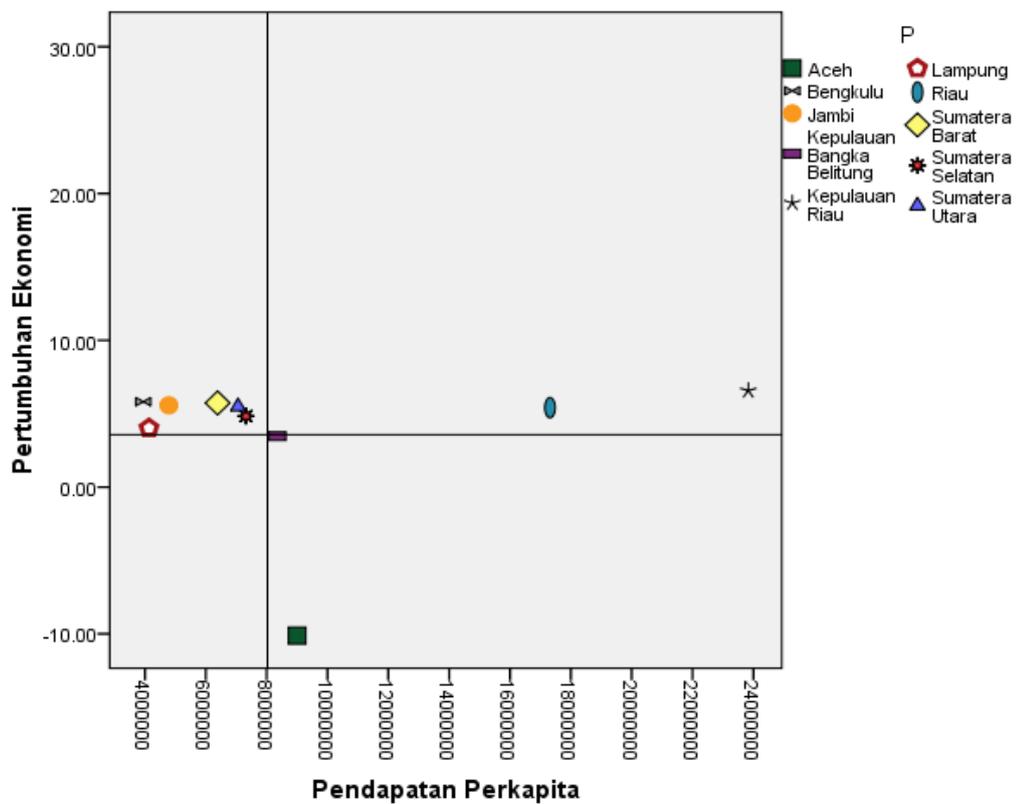
1. Daerah cepat maju dan cepat tumbuh (*high income and high growth*) yaitu pada kuadran I.
2. Daerah berkembang cepat (*high growth but low income*) yaitu pada kuadran II.
3. Daerah maju tapi tertekan (*high income but low growth*) yaitu pada kuadran III.
4. Daerah relatif tertinggal (*low growth and low income*) yaitu pada kuadran IV.

Selama periode pengamatan tahun 2004-2012, sepuluh propinsi di Pulau Sumatera ada yang tetap pada kuadran awal dan ada juga yang mengalami perpindahan kuadran yang mana satu sama lain tidak selalu menetap pada satu kuadran dan juga tidak selalu berpindah-pindah. Perpindahan propinsi ke kuadran yang berbeda ini diakibatkan oleh seiring dengan kondisi pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita yang tercipta setiap tahunnya selama periode 2004-2012.

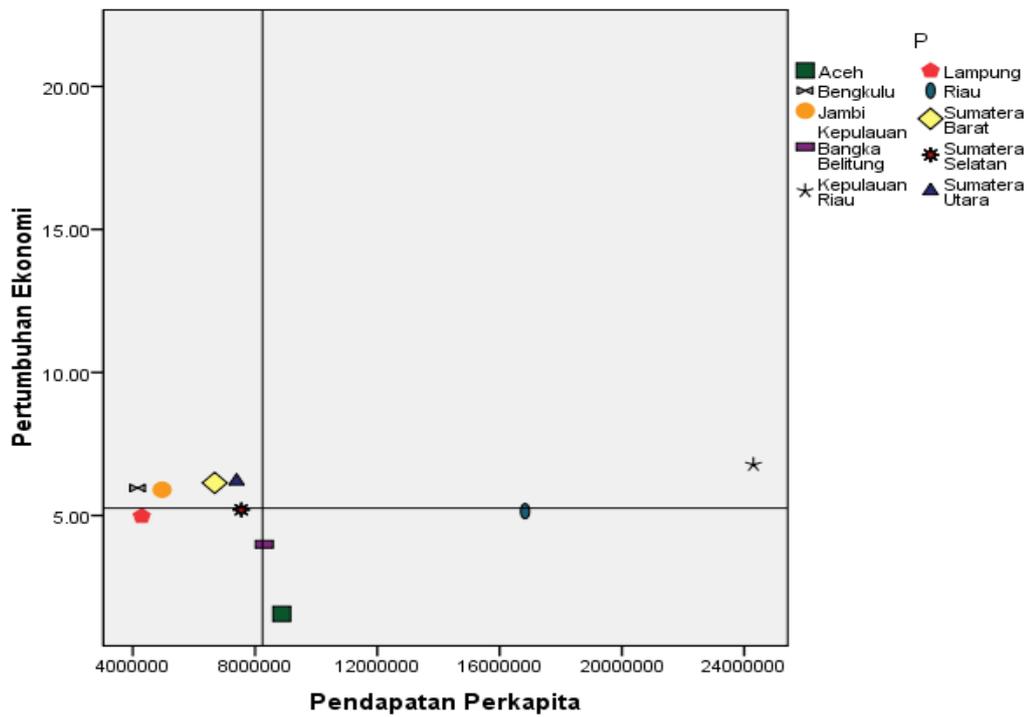
Dari hasil perhitungan pada Gambar 4.4 sampai Gambar 4.11 dan Tabel 4.4 terlihat bahwa ada propinsi yang cenderung tidak mengalami perpindahan kuadran selama periode 2004-2012 yaitu pada kuadran I (pertama) yang merupakan klasifikasi propinsi cepat maju dan cepat tumbuh, terlihat Propinsi Kepulauan Riau tetap stabil pada kuadran I tersebut selama periode pengamatan. Sedangkan pada kuadran II (kedua) yang termasuk pada klasifikasi propinsi berkembang cepat selama pengamatan adalah Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, dan Lampung. Kuadran III (ketiga) dengan Klasifikasi propinsi maju tapi tertekan dan kuadran IV (keempat) dengan klasifikasi propinsi yang relatif tertinggal ditempati oleh Propinsi Aceh, Sumatera Selatan, Riau, dan Kepulauan Bangka Belitung secara

bergantian seiring dengan perkembangan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita yang tercipta.

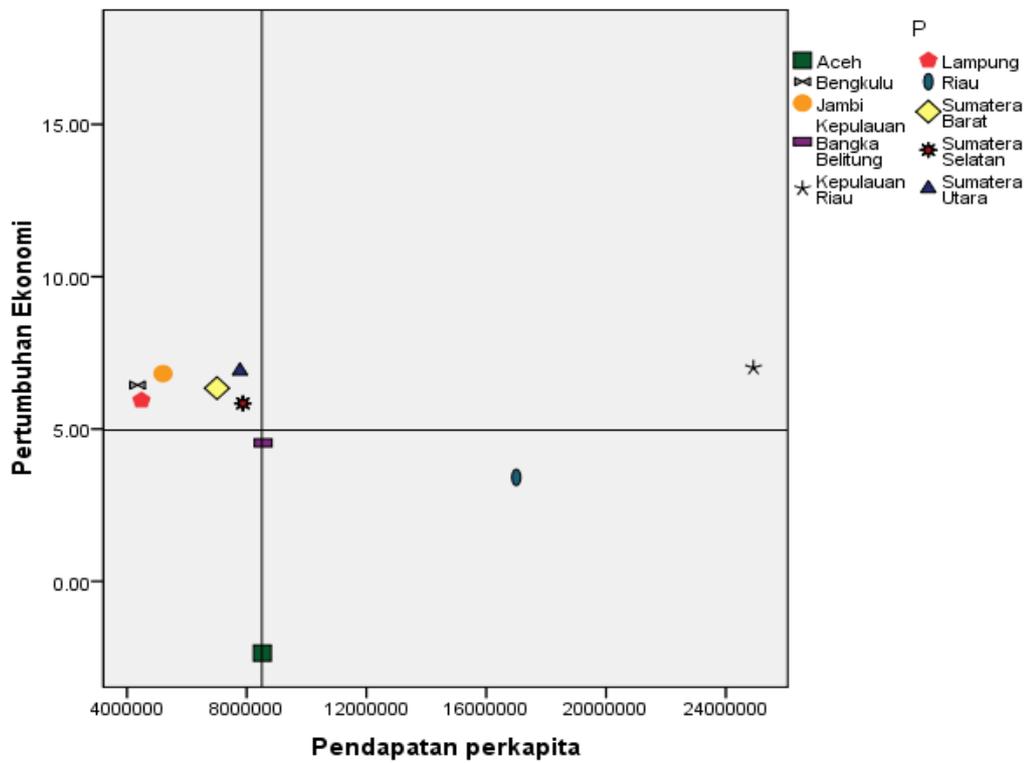
Gambar 4.4 Klasifikasi Propinsi Berdasarkan Tipologi Klassen Tahun 2005



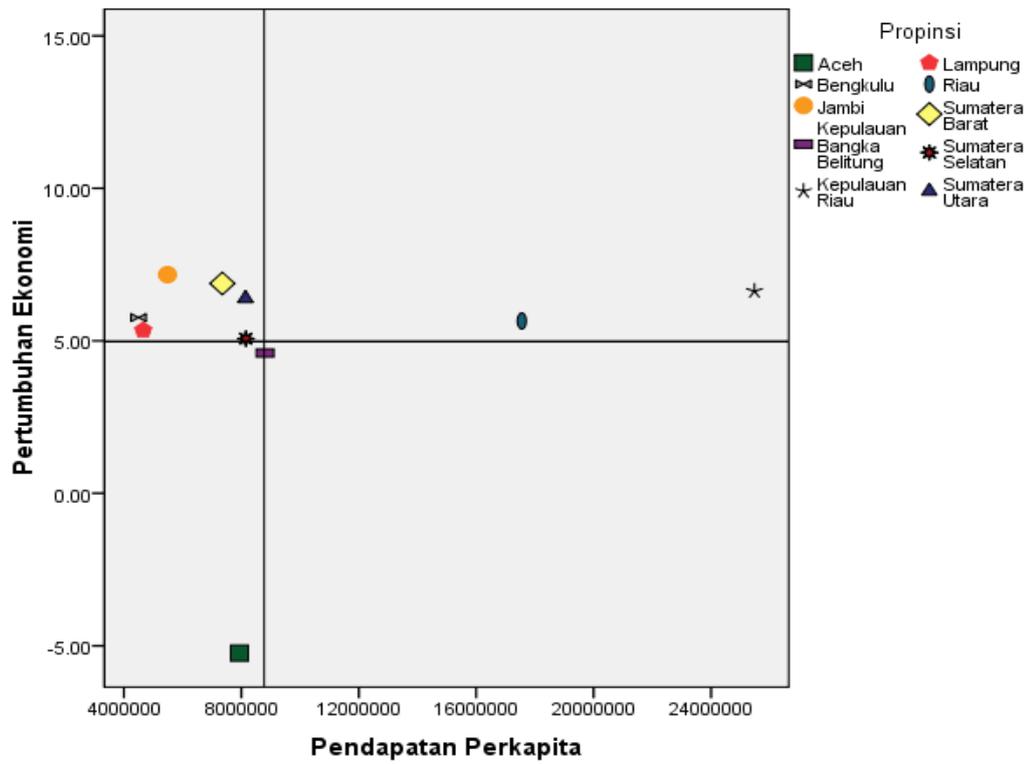
Gambar 4.5 Klasifikasi Propinsi Berdasarkan Tipologi Klassen Tahun 2006



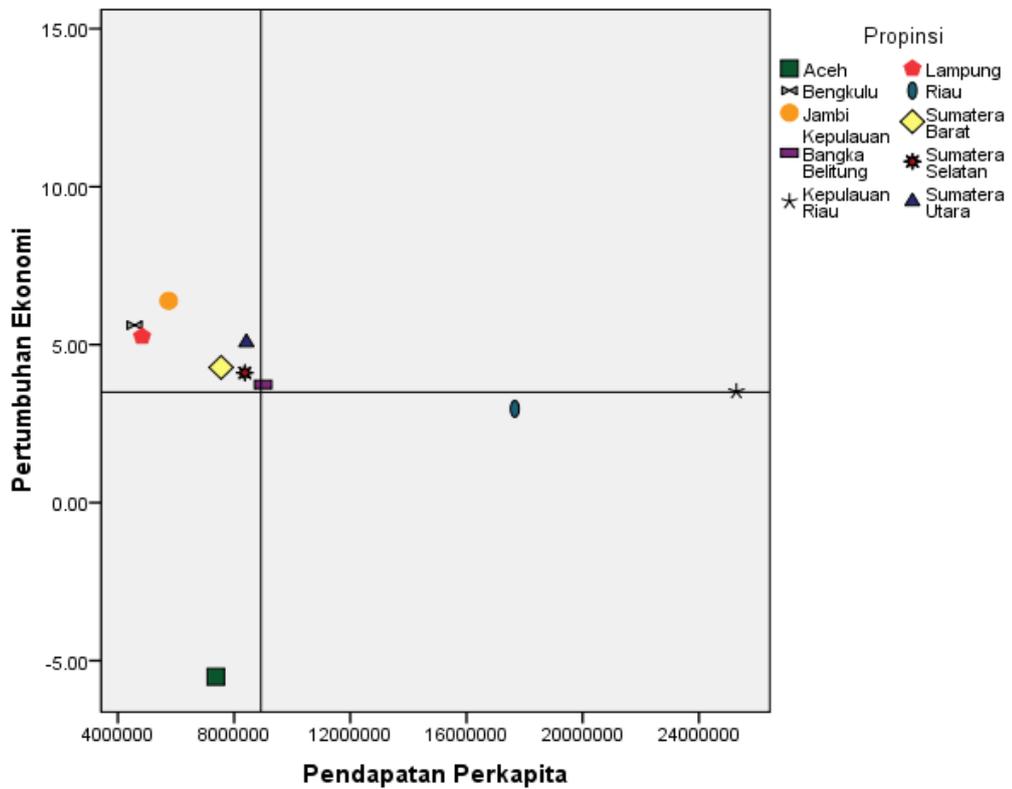
Gambar 4.6 Klasifikasi Propinsi Berdasarkan Tipologi Klassen Tahun 2007



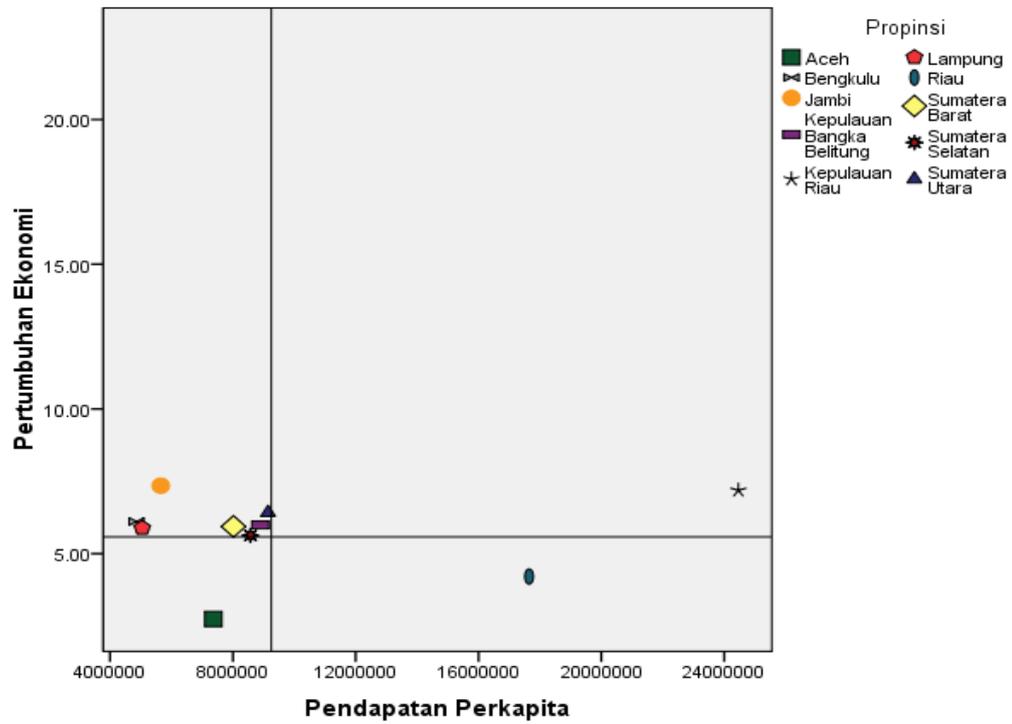
Gambar 4.7 Klasifikasi Propinsi Berdasarkan Tipologi Klassen Tahun 2008



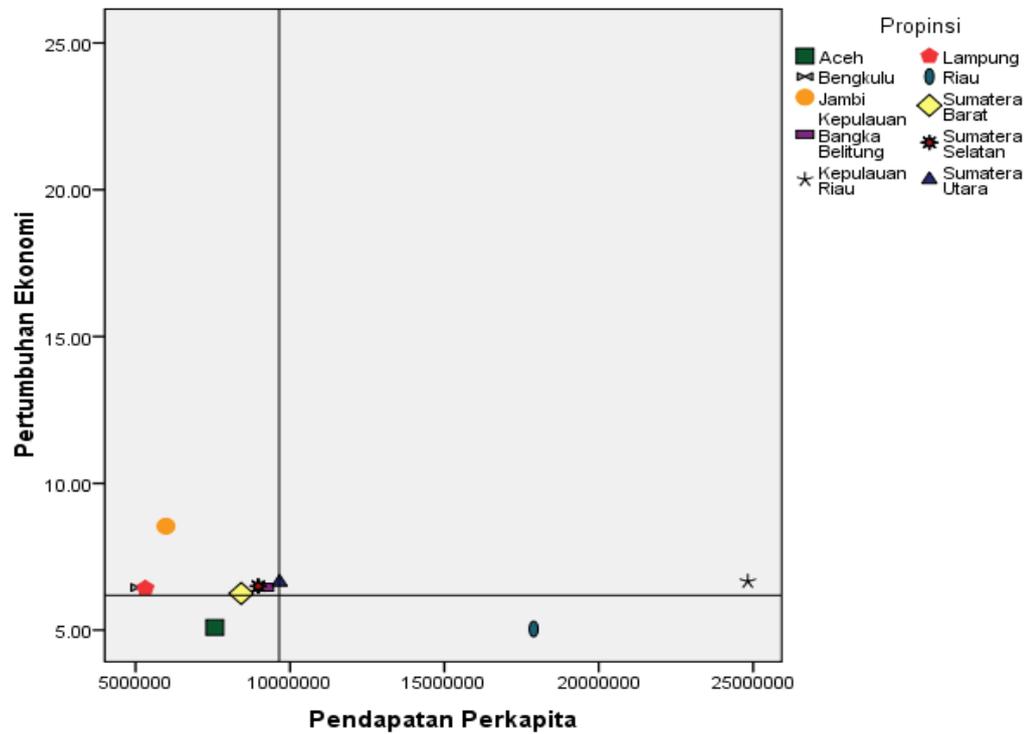
Gambar 4.8 Klasifikasi Propinsi Berdasarkan Tipologi Klassen Tahun 2009



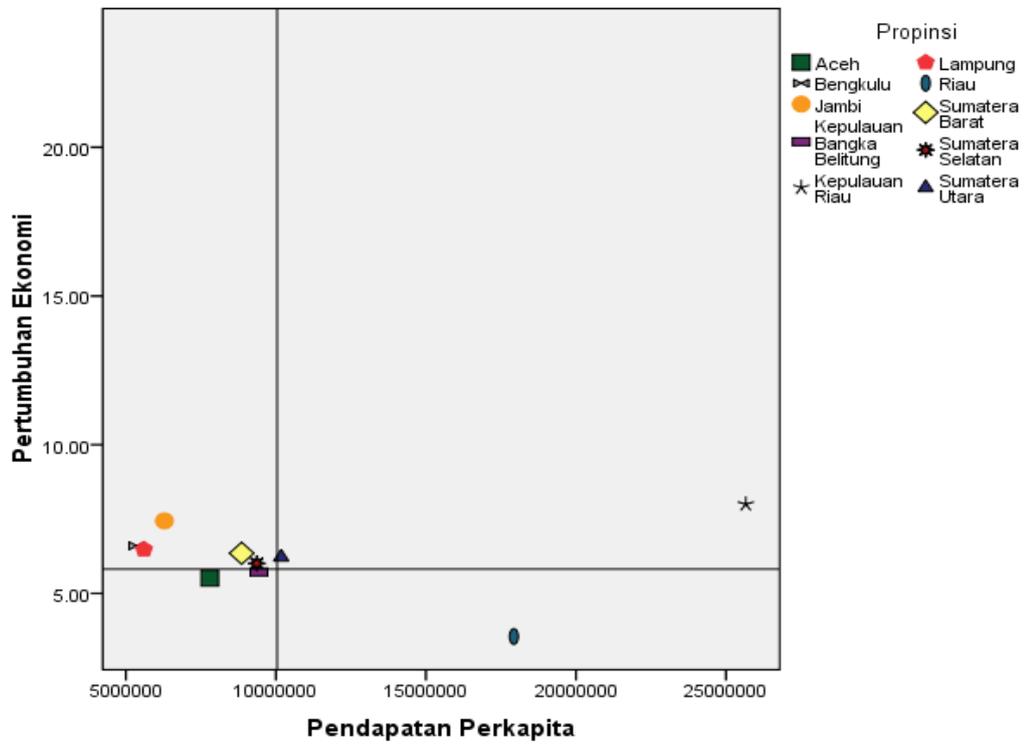
Gambar 4.9 Klasifikasi Propinsi Berdasarkan Tipologi Klassen Tahun 2010



Gambar 4.10 Klasifikasi Propinsi Berdasarkan Tipologi Klassen Tahun 2011



Gambar 4.11 Klasifikasi Propinsi Berdasarkan Tipologi Klassen Tahun 2012



Sumber: Data diolah

Tabel 4.4 Klasifikasi Propinsi Berdasarkan Tipologi Klassen Pertahun 2005-2012

Propinsi/Tahun	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Aceh	Kuadran III	Kuadran III	Kuadran III	Kuadran IV				
Sumatera Utara	Kuadran II	Kuadran I	Kuadran I					
Sumatera Barat	Kuadran II							
Riau	Kuadran I	Kuadran III	Kuadran III	Kuadran I	Kuadran III	Kuadran III	Kuadran III	Kuadran III
Jambi	Kuadran II							
Sumatera Selatan	Kuadran II	Kuadran IV	Kuadran II					
Bengkulu	Kuadran II							
Lampung	Kuadran II							
Kepulauan Bangka Belitung	Kuadran III	Kuadran III	Kuadran III	Kuadran III	Kuadran I	Kuadran II	Kuadran II	Kuadran IV
Kepulauan Riau	Kuadran I							

Sumber : Data diolah

Keterangan: Kuadran I : Propinsi cepat maju dan cepat tumbuh
 Kuadran II : Propinsi berkembang cepat
 Kuadran III : Propinsi maju tapi tertekan
 Kuadran IV : Propinsi yang relatif berkembang

4.1.2.3. Disparitas Pembangunan Ekonomi

Analisis disparitas pembangunan ekonomi di Pulau Sumatera periode 2004-2012 adalah menggunakan perhitungan indeks Williamson. Dua indikator yang digunakan untuk mencari nilai indeks Williamson adalah pendapatan perkapita propinsi dan Sumatera serta jumlah penduduk propinsi dan Sumatera. Nilai indeks Williamson berada diantara nol dan satu, jika nilai indeks Williamson antara 0,00-0,35 maka dikatakan pembangunan antar daerah cukup merata, jika nilai indeks Williamson antara 0,36-0,75 maka disparitas pembangunan antar daerah disebut moderat atau sedang, dan jika nilai indeks Williamson antara 0,76-1,00 maka disparitas pembangunan antar daerah sangat timpang.

Pada Gambar 4.12 terlihat bahwa nilai indeks Williamson antar propinsi di Sumatera dari tahun ketahun selalu mengalami penurunan, yang berarti bahwa pembangunan ekonomi setiap tahunnya di Pulau Sumatera relatif merata. Nilai indeks Williamson dari tahun 2004 sampai tahun 2012 berada dikisaran antara 0,445 sampai 0,554. Nilai ini menunjukkan bahwa selama periode 2004-2012 disparitas pemabangunan ekonomi antar propinsi di Sumatera berada pada posisi moderat atau disparitas pembangunan ekonomi yang sedang. Berikut ini Gambar 4.12 berupa grafik indeks Williamson periode 2004-2012 di Pulau Sumatera.

Gambar 4.12 Grafik Indeks Williamson Tahun 2004-2012



Sumber: Data diolah

Berdasarkan Gambar 4.12 dapat dilihat bahwa grafik indeks Williamson selama periode pengamatan semakin lama semakin menurun. Ini menunjukkan bahwa disparitas pembangunan ekonomi antar propinsi di Pulau Sumatera semakin lama semakin merata. Untuk lebih jelas Tabel 4.5 berikut ini merupakan nilai indeks Williamson berdasarkan hasil perhitungan.

Tabel 4.5 Indeks Williamson Pulau Sumatera Periode 2004-2012

Tahun	Indeks Williamson
2004	0,554
2005	0,553
2006	0,531
2007	0,519
2008	0,519
2009	0,508
2010	0,484
2011	0,468

2012	0,455
------	-------

Sumber: Data diolah

4.1.2.4. Hubungan Pendapatan Perkapita dan Disparitas Pembangunan Ekonomi di Pulau Sumatera

Untuk melihat bagaimana hubungan antara pendapatan perkapita dan disparitas pembangunan ekonomi dalam penelitian ini maka digunakan nilai PDRB perkapita Sumatera dan nilai indeks Williamson yang berlaku di Sumatera. Berikut ini tercantum pada Tabel 4.6 dan Gambar 4.5 hubungan antara pendapatan perkapita dan disparitas pembangunan ekonomi yang tercipta di Pulau Sumatera periode 2004-2012.

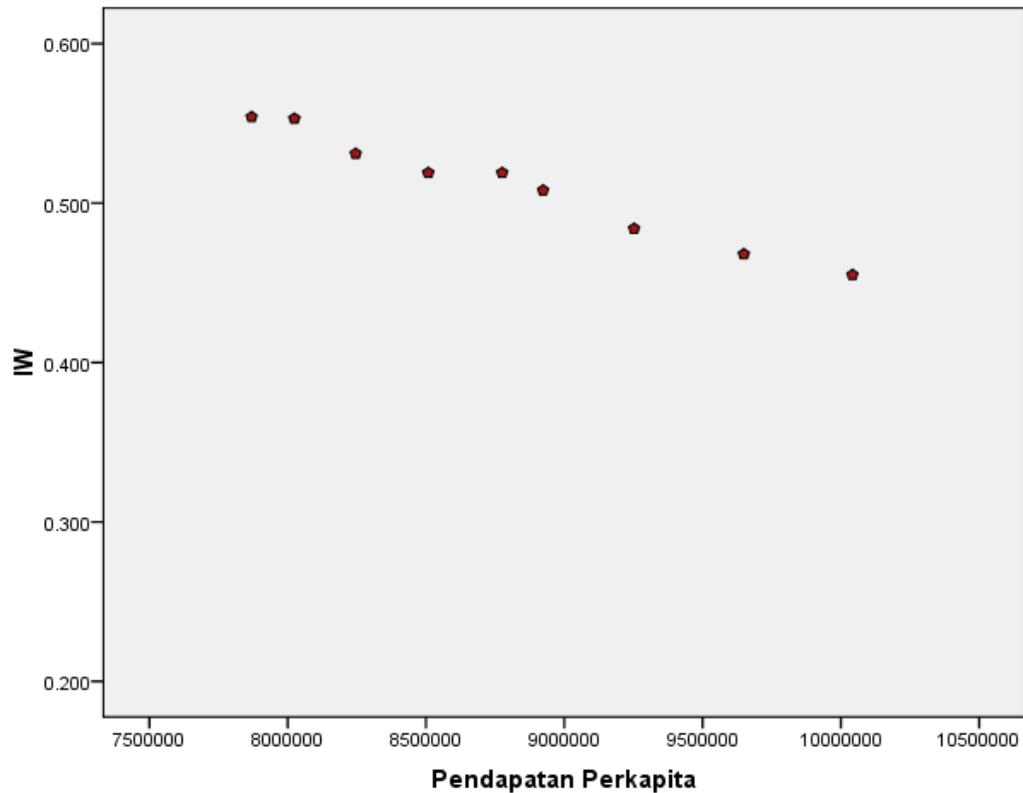
Hubungan pendapatan perkapita dan disparitas pembangunan ekonomi yang diperlihatkan oleh Gambar 4.6 menunjukkan bahwa pada tahun 2004 pendapatan perkapita di Sumatera masih lebih kecil daripada tahun sesudahnya yaitu 7.869.419 rupiah dan disparitas pembangunannya berada pada posisi yang moderat (sedang) dibuktikan dengan nilai indeks Williamson sebesar 0,554.

Tabel 4.6 Hubungan Antara Pendapatan Perkapita dan Disparitas Pembangunan Ekonomi Sumatera.

Tahun	Pendapatan Perkapita	Indeks Williamson
2004	7.869.419	0,554
2005	8.024.201	0,553
2006	8.245.667	0,531
2007	8.508.091	0,519
2008	8.775.338	0,519
2009	8.923.306	0,508
2010	9.252.091	0,484
2011	9.649.020	0,468
2012	10.041.507	0,455

Sumber: Data diolah

Gambar 4.13 Hubungan Antara Pendapatan Perkapita dan Disparitas Pembangunan Ekonomi (IW) Sumatera.



Keterangan: _____ adalah data aktual
 _____ Adalah kurva tren

Sumber: Data diolah

Kemudian pada tahun berikutnya yaitu tahun 2005 hingga tahun 2012 pendapatan perkapita selalu mengalami kenaikan. Disisi lain seiring dengan berjalannya waktu, disparitas pembangunan ekonomi di Pulau Sumatera selalu mengalami penurunan setiap tahunnya hingga akhir periode pengamatan. Akan tetapi pada tahun 2008 terlihat bahwa pada saat pendapatan perkapita meningkat dari tahun sebelumnya (tahun 2007) malah nilai indeks Williamson yang tercipta tidak berubah sama sekali.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Klasifikasi Daerah

Berdasarkan hasil penelitian selama periode 2004-2012 terjadi kegiatan ekonomi yang berbeda-beda antar propinsi yang satu dengan propinsi yang lain di Pulau Sumatera. Kegiatan ekonomi tersebut diperlihatkan oleh nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh masing-masing propinsi dalam bentuk nilai Produk Domestik Regional Bruto, pendapatan perkapita, dan pertumbuhan ekonomi yang tercipta setiap tahunnya. Melalui nilai dari pendapatan perkapita propinsi dan pertumbuhan ekonomi propinsi serta pendapatan rata-rata Pulau Sumatera dan pertumbuhan ekonomi Sumatera akan diklasifikasikan masing-masing propinsi di Pulau Sumatera menjadi empat klasifikasi. Kuadran I (pertama) adalah klasifikasi propinsi cepat maju dan cepat tumbuh, kuadran II (kedua) adalah klasifikasi propinsi berkembang cepat, kuadran III (ketiga) adalah klasifikasi propinsi maju tapi tertekan, dan kuadran IV (keempat) adalah klasifikasi propinsi yang relatif tertinggal di Sumatera.

Dari tahun 2005 sampai 2012 pada Gambar 4.4 sampai Gambar 4.11 dan Tabel 4.4 terlihat bahwa Propinsi Kepulauan Riau berada pada kuadran I, hal ini menunjukkan bahwa Propinsi Kepulauan Riau termasuk klasifikasi propinsi yang cepat maju dan cepat tumbuh. Artinya selama periode pengamatan Propinsi Kepulauan Riau memiliki pendapatan perkapita yang lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan rata-rata Pulau Sumatera. Selain itu, persentase pertumbuhan ekonomi Propinsi Kepulauan Riau juga lebih tinggi dibandingkan dengan persentase pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera. Selama periode 2004-2012 pendapatan perkapita rata-rata Propinsi Kepulauan Riau Rp 24.742.987 dan pendapatan rata-rata Pulau Sumatera Rp 8.809.849 sedangkan pertumbuhan ekonomi Propinsi Kepulauan Riau sebesar 6,57 persen dan pertumbuhan ekonomi rata-rata Pulau Sumatera sebesar 5,08 persen.

Kepulauan Riau merupakan propinsi termuda di Pulau Sumatera yang dimekarkan dari Propinsi Riau pada tanggal 25 Oktober 2002. Meskipun merupakan propinsi termuda dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit dibanding propinsi lain di Sumatera dan merupakan hasil pemekaran dari propinsi Riau tetapi pendapatan

perkapita dan pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan lebih besar dibandingkan dengan propinsi induknya (Propinsi Riau) dan bahkan lebih besar dibandingkan dengan pendapatan rata-rata dan pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera. Keberhasilan Kepulauan Riau ini karena ditopang oleh sektor industri pengolahan yang mencapai Rp 22.239.553.000.000 atau sekitar 50,76% dari total PDRB sektoral Propinsi Kepulauan Riau. Kemampuan Propinsi Kepulauan Riau menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita di atas pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita Pulau Sumatera menyebabkan Kepulauan Riau tetap pada propinsi yang cepat maju dan cepat tumbuh di Pulau Sumatera selama periode pengamatan tahun 2004-2012.

Propinsi Riau yang merupakan propinsi induk dari Kepulauan Riau pada tahun 2005 juga tergolong sebagai propinsi yang cepat maju dan cepat tumbuh karena pendapatan perkapita dan laju pertumbuhan ekonominya lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan rata-rata dan laju pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera. Setelah itu, pada tahun 2006 dan 2007 laju pertumbuhan ekonomi Propinsi Riau menurun secara berturut-turut sebesar 5,15 persen dan 3,41 persen, hal ini membuat posisi Propinsi Riau menjadi propinsi yang maju tapi tertekan. Kemunduran kinerja ekonomi Propinsi Riau tidak membuat propinsi tersebut semakin melemah, ini terlihat dari kenaikan laju pertumbuhan ekonomi yang diciptakan oleh Propinsi Riau ditahun 2008 naik menjadi 5,65 persen yang didukung oleh kenaikan PDRB dari seluruh sektor yang ada di Riau. Kenaikan pertumbuhan ekonomi ini membawa Propinsi Riau kembali menjadi propinsi yang cepat maju dan cepat tumbuh.

Pada tahun 2009, keadaan ekonomi dunia mulai merosot yang berawal dari krisis ekonomi di Eropa. Keadaan ini melanda seluruh dunia yang berakibat terjadinya krisis ekonomi dunia. Indonesia sebagai negara pengekspor barang baku dan barang setengah jadi yang tujuan ekspornya adalah negara-negara Eropa dan Amerika tentu akan terkena imbasnya juga. Hal ini menggoyang perekonomian Indonesia secara global hingga ke masing-masing propinsi termasuk Propinsi

Riau. Imbas dari krisis ekonomi dunia ini membuat laju pertumbuhan ekonomi Propinsi Riau merosot sangat signifikan yaitu menjadi 2,97 persen. Penurunan laju pertumbuhan ekonomi yang signifikan ini tidak semudah telapak tangan untuk menstabilkannya kembali, yang pada akhirnya menjadikan Propinsi Riau kembali menjadi propinsi yang cepat maju tapi tertekan hingga akhir periode pengamatan yaitu tahun 2012.

Propinsi yang relatif satabil perekonomiannya adalah propinsi Sumatera Utara, kestabilan ekonomi propinsi ini membuat Sumatera Utara berada pada kuadran II yaitu klasifikasi propinsi yang berkembang cepat dari tahun 2005 sampai tahun 2010. Artinya bahwa Propinsi Sumatera Utara memiliki pendapatan perkapita yang lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan rata-rata pulau Sumatera, akan tetapi pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pulau Sumatera.

Pada tahun 2011 Indonesia termasuk negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua setelah negara China yaitu sebesar 6,5 persen dan relatif stabil hingga tahun 2012 menjadi 6,23 persen. Penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia ditahun 2012 diakibatkan oleh penurunan dari sektor pertanian hingga 23,06 persen karena siklus musiman. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini juga dialami oleh Propinsi Sumatera Utara, sehingga pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara sebesar 6,63 persen tahun 2011 dan 6,22 persen tahun 2012 mengalahkan pertumbuhan ekonomi rata-rata Pulau Sumatera. Selain itu, pendapatan perkapita Sumatera Utara juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan yang barang tentu lebih besar daripada pendapatan rata-rata Pulau Sumatera yaitu Rp 9.660.554 pada tahun 2011 dan Rp 10.174.795 pada tahun 2012. Kenaikan pendapatan perkapita dan pertumbuhan ekonomi ini membawa Propinsi Sumatera Utara menjadi propinsi yang cepat maju dan cepat tumbuh pada tahun 2011 dan 2012.

Selama periode 2004-2012 ada beberapa propinsi di Pulau Sumatera yang relatif stabil pada kuadran yang sama yaitu pada kuadran II, propinsi yang dimaksud

antara lain adalah Propinsi Sumatera Barat, Jambi, dan Bengkulu. Ketiga propinsi ini termasuk propinsi yang berkembang cepat, yang berarti bahwa ketiga masing-masing propinsi ini memiliki pendapatan perkapita yang lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan rata-rata Pulau Sumatera. Akan tetapi laju pertumbuhan ekonomi masing-masing propinsi lebih tinggi bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera.

Selain ketiga propinsi tersebut, Propinsi Sumatera Selatan dan Propinsi Lampung juga relatif stabil pada kuadran II selama periode pengamatan. Namun pada tahun 2006 Propinsi Sumatera Selatan dan Propinsi Lampung mengalami pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita di bawah pertumbuhan ekonomi dan pendapatan rata-rata Pulau Sumatera. Akibatnya kedua propinsi ini mengalami ketertinggalan sehingga termasuk menjadi propinsi yang relatif tertinggal dibandingkan dengan propinsi lainnya di Pulau Sumatera. Setelah itu, pertumbuhan ekonomi Propinsi Sumatera Selatan dan Propinsi Lampung mulai tumbuh diatas laju pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera hingga akhir tahun periode pengamatan 2012 sehingga kedua propinsi kembali menjadi propinsi yang berkembang cepat.

Tiga tahun berturut-turut dari tahun 2005 sampai 2007 Propinsi Aceh berada pada kuadran III yaitu propinsi yang maju tapi tertekan. Keberadaan propinsi ini pada kuadran III dikarenakan pendapatan perkapita di Propinsi Aceh berada di atas pendapatan rata-rata Pulau Sumatera, akan tetapi pertumbuhan ekonomi yang tercipta berada dibawah pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera. Rendahnya pertumbuhan ekonomi selama tiga tahun tersebut di Propinsi Aceh merupakan akibat dari bencana alam Tsunami yang melanda Aceh pada akhir tahun 2004. Tsunami terbesar sepanjang sejarah Indonesia tersebut melululantakan bangunan masyarakat, swasta, dan infrastruktur sehingga sarana pendukung perekonomian Aceh sangat minim.

Pertumbuhan ekonomi propinsi yang lebih rendah daripada Pulau Sumatera adalah sesuatu yang lumrah dan biasa terjadi, akan tetapi pertumbuhan ekonomi Propinsi Aceh ini sangat jauh diluar kebiasaan yakni mencapai -10,12% pada tahun 2005. Pertumbuhan ekonomi yang negatif ini terus terjadi hingga tahun 2009 meskipun pada tahun 2006 sempat tumbuh sebesar 1,56%. Artinya bahwa pendapatan yang tercipta dari PDRB Propinsi Aceh selalu mengalami penurunan semenjak kejadian Tsunami Aceh 2004, sehingga samapi akhir periode penelitain 2012 PDRB Propinsi Aceh belum stabil layaknya sebelum kejadian Tsunami tersebut. Angka PDRB Propinsi Aceh tahun 2004 bernilai 40,374 triliun rupiah sedangkan pada tahun 2012 baru mencapai 36,600 triliun rupiah.

Pada tahun 2008 Propinsi Aceh mulai masuk ke klasifikasi propinsi yang relatif tertinggal hingga tahun 2012. Ketertinggalan tersebut terlihat dari pendapatan perkapita maupun pertumbuhan ekonomi Propinsi Aceh berada dibawah pendapatan rata-rata dan dibawah pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera berdasarkan Tabel 4.4.

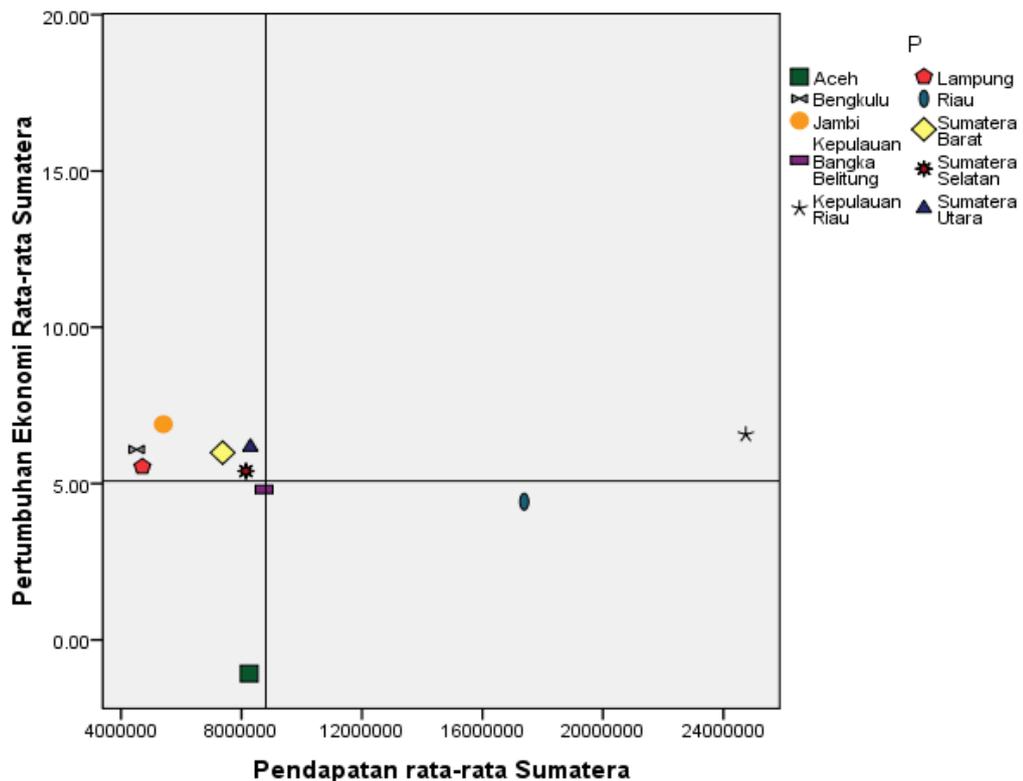
Kepulauan Bangka Belitung merupakan propinsi yang mekar dari Propinsi Sumatera selatan. Lepasnya Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Sumatera Selatan ternyata mampu berdiri sendiri dalam menjalankan roda perekonomian daerah. Hal ini terlihat dari Tabel 4.4 bahwa Propinsi Kepulauan Bangka Belitung berada pada klasifikasi propinsi yang maju tapi tertekan hingga tahun 2009, artinya bahwa pendapatan perkapita Propinsi Kepulauan Bangka Belitung berada diatas pendapatan rata-rata Pulau Sumatera meskipun pertumbuhannya masih dibawah pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera.

Pada tahun 2010 sampai tahun 2012 kegiatan ekonomi di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung berjalan relatif lambat dibandingkan dengan propinsi lain di Sumatera. Akibatnya adalah propinsi ini menjadi masuk dalam kategori propinsi berkembang cepat di tahun 2010 dan 2011. Kemudian tahun 2012 menurun menjadi propinsi yang relatif tertinggal karena pendapatan perkapita Propinsi

Kepulauan Bangka Belitung lebih rendah dan pertumbuhan ekonominya lebih lambat dibandingkan dengan pendapatan rata-rata dan pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera. Penyebab rendahnya pendapatan perkapita dan lambatnya pertumbuhan ekonomi Kepulauan Bangka Belitung adalah akibat dari minimnya keberadaan listrik dan air bersih, angkutan/komunikasi, serta akses perbankan. Ketiga sektor ini hanya bisa menyumbang dengan rata-rata 0,52 persen sektor listrik dan air bersih, 3,30 persen sektor angkutan/komunikasi, dan 3,40 persen sektor bank/keuangan. Jika ketiga sektor ini berjalan baik maka kegiatan ekonomi juga akan berjalan baik karena listrik, angkutan, dan komunikasi adalah sarana pendukung aktivitas ekonomi sedangkan keuangan adalah modal finansial dalam menjalankan sebuah usaha.

Disisi lain, klasifikasi propinsi secara rata-rata selama periode 2004-2012 terlihat pada Gambar 4.14 dan Tabel 4.7 bahwa daerah yang termasuk propinsi cepat maju dan cepat tumbuh adalah Propinsi Kepulauan Riau, Daerah yang termasuk propinsi berkembang cepat adalah Propinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan Bengkulu, dan Lampung, Daerah yang maju tapi tertekan adalah Propinsi Riau, sedangkan daerah yang relatif tertinggal adalah Propinsi Aceh dan Kepulauan Bangka Belitung. Keberadaan masing-masing propinsi pada berbagai kuadran klasifikasi propinsi merupakan gambaran dari pendapatan perkapita dan pertumbuhan ekonomi yang diciptakan selama periode pengamatan.

Gambar 4.14 Scatter klasifikasi Rata-Rata Propinsi di Sumatera Periode 2004-2012 Berdasarkan Tipologi Klassen



Sumber: Data diolah

Tabel 4.7 Klasifikasi Rata-Rata Propinsi di Sumatera Periode 2004-2012 Berdasarkan Tipologi Klassen

No	Propinsi	Pertumbuhan Rata-Rata	Pendapatan Rata-Rata	Klasifikasi
1	Aceh	-1,08	8.256.614	Relatif tertinggal
2	Sumatera Utara	6,17	8.293.654	Berkembang cepat
3	Sumatera Barat	5,99	7.372.287	Berkembang cepat
4	Riau	4,42	17.386.010	Maju tapi tertekan
5	Jambi	6,90	5.405.311	Berkembang cepat
6	Sumatera Selatan	5,40	8.145.181	Berkembang cepat
7	Bengkulu	6,09	4.515.518	Berkembang cepat
8	Lampung	5,54	4.706.340	Berkembang cepat
9	Kepulauan Bangka Belitung	4,81	8.749.524	Relatif tertinggal
10	Kepulauan Riau	6,57	24.742.983	Cepat maju dan cepat tumbuh
	Sumatera	5,08	8.809.849	

Sumber: Data diolah

4.2.2. Disparitas Pembangunan Ekonomi

Berdasarkan pada Gambar 4.12 dan Tabel 4.5 terlihat jelas bahwa disparitas pembangunan ekonomi antar propinsi di Pulau Sumatera berada pada posisi yang mudorat atau disparitas yang sedang karena nilai indeks Williamson yang tercipta berada diantara 0,36 sampai 0,75. Artinya bahwa disparitas pembangunan ekonomi antar propinsi di Pulau Sumatera adalah relatif merata satu sama lain. Disparitas pembangunan yang relatif stabil ini merupakan nilai yang sangat bagus untuk pembangunan antar propinsi di Pulau Sumatera serta patut untuk diapresiasi.

Nilai indeks Williamson awal pengamatan tahun 2004 adalah sebesar 0,554 dan kemudian setiap tahunnya mengalami penurunan hingga akhir pengamatan tahun 2012 menurun menjadi 0,455. Nilai ini menunjukkan bahwa pemerintah berhasil menurunkan disparitas pembangunan antar propinsi di Pulau Sumatera setiap tahunnya. Keberhasilan ini adalah salah satu buah hasil dari kerjasama atau koordinasi antar propinsi di Pulau Sumatera melalui *Forum Koordinasi Antar Propinsi Se-Wilayah Sumatera*. Agenda terakhir forum ini di adakan di Sumatera Utara pada 22-24 Juni 2013 yang memfokuskan pada pembahasan Infrastruktur, ekonomi dan ketahanan pangan, sosial budaya dan SDM, serta tata ruang dan kawasan perbatasan.

Kerjasama dan koordinasi ini akan tetap berlanjut secara permanen karena pemerintah dari seluruh propinsi di Pulau Sumatera menyadari betapa pentingnya kerjasama seperti ini untuk mewujudkan Pulau Sumatera yang maju, harmonis dan damai sebagaimana Pulau Jawa saat ini yang sudah sama-sama maju antar propinsi yang satu dengan propinsi lainnya. Pemerataan pembangunan di Pulau Jawa terwujud karena adanya kerjasama antar daerah yang sudah dirintis puluhan tahun yang lalu seperti kerjasama Jabodetabek, Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP), kerjasama Wilayah Jawa-Bali, dan lain-lain.

Nilai indeks Williamson antar propinsi di Pulau Sumatera relatif rendah atau berada pada disparitas pembangunan ekonomi yang moderat. Akan tetapi hal yang

berbeda terlihat pada Indonesia secara nasional. Nilai indeks Williamson yang dihasilkan antar propinsi di Indonesia secara nasional berada pada nilai antara 0,813 sampai dengan 0,886 pada periode 2000-2010. Nilai ini menunjukkan bahwa disparitas pembangunan antar propinsi di Indonesia sangat timpang meskipun nilai indeks Williamsonnya menurun setiap tahun (Soleh, 2010).

Keberadaan propinsi di Pulau Sumatera menjadi propinsi yang memiliki disparitas pembangunan moderat merupakan sebuah prestasi yang tercapai selama periode 2004-2012. Akan tetapi bukan berarti disparitas pembangunan ekonomi antar propinsi di Pulau Sumatera sudah bagus. Masih perlu perhatian pemerintah setempat untuk menekan disparitas pembangunan ekonommi tersebut. Pemicu disparitas antar propinsi di Pulau Sumatera adalah sebagai berikut:

1. Keberadaan Sumberdaya Alam

Propinsi dengan kandungan sumberdaya yang cukup tinggi meliputi sektor pertanian, pertambangan, dan migas di Pulau Sumatera pada tahun 2011 adalah Propinsi Riau sebesar 66,157 Triliun rupiah, Sumatera Utara sebesar 29,276 Triliun rupiah, Sumatera Selatan sebesar 27,759 Triliun rupiah, Lampung sebesar 16,370 Triliun rupiah, dan Aceh 11,467 Triliun rupiah. Kondisi inilah yang mendorong pertumbuhan ekonomi propinsi bersangkutan menjadi lebih cepat.

2. Perbedaan kondisi demografi

Propinsi dengan kondisi demografi yang baik yaitu jumlah penduduk yang banyak tapi berkualitas secara SDM akan menghasilkan pembangunan ekonomi yang baik juga, tapi jumlah penduduk yang cukup banyak namun kurang berkualitas akan menjadi beban pada propinsi tersebut. Di Pulau Sumatera belum memiliki SDM yang cukup bagus sehingga jumlah penduduk membuat PDRB perkapita masing-masing propinsi menjadi lebih rendah. Tiga propinsi di Pulau Sumatera yang memiliki jumlah

penduduk yang cukup besar ditahun 2012 adalah Propinsi Sumatera Utara sebanyak 12.847.386 jiwa, Lampung sebanyak 7.402.962 jiwa, dan Sumatera Selatan sebanyak 7.158.458 jiwa berdasarkan Lampiran 2 pada penelitian ini.

3. Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa

Propinsi yang jauh dari jalur lalu lintas Sumatera menyebabkan propinsi tersebut kesusahan dalam memobilitas barang dan jasa. Sebagai akibatnya adalah propinsi tersebut mempunyai PDRB yang rendah dari hasil *suplay* barang dan jasa ke luar propinsi maupun dari luar ke dalam propinsi. Contohnya adalah propinsi Bengkulu yang letak geografisnya jauh dari jalur lalu lintas Sumatera menyebabkan nilai PDRB yang terwujud hanya 9,464 Triliun rupiah di tahun 2012 berdasarkan Lampiran 1 pada penelitian ini.

4. Konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah

Konsentrasi kegiatan ekonomi tersebut dapat disebabkan oleh beberapa hal yaitu:

- a. Karena terdapatnya sumberdaya alam yang lebih banyak di daerah tertentu, seperti migas, batu bara, bahan mineral, dan lain-lain. Sumberdaya yang banyak ini terdapat di Propinsi Riau, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, dan Aceh sesuai penjelasan poin satu pada pemicu disparitas di Pulau Sumatera.
- b. Meratanya fasilitas transportasi, baik darat, laut, dan udara. Hal ini terlihat pada Propinsi Bengkulu yang memiliki PDRB terendah dan minim dalam transportasi darat (kereta api/listrik tidak ada), transpor laut yang memiliki dermaga yang kecil, dan transportasi udara memiliki bandara yang kecil dan belum bertaraf internasional.

4.2.3. Hubungan Pendapatan Perkapita dan Disparitas Pembangunan Ekonomi di Pulau Sumatera

Banyak indikator yang dijadikan pemerintah sebagai alat ukur keberhasilan dalam kinerja ekonomi dan sosial daerah, diantara indikator tersebut antara lain adalah pendapatan perkapita dan tingkat disparitas pembangunan ekonomi. Pada satu sisi bisa jadi pendapatan perkapita berada pada posisi yang tinggi dan disparitas pemabangunan ekonominya rendah, dan disisi lain bisa jadi pendapatan perkapita dan disparitas pembangunannya sama-sama tinggi atau sama-sama rendah. Hal ini perlu dibahas guna melihat kedua indikator ini berada diposisi mana serta seperti apa hubungan keduanya.

Suatu wilayah akan lebih baik bilamana pendapatan perkapita antar propinsi di daerah tersebut sama-sama memiliki pendapatan perkapita yang tinggi dan disparitas pembangunan ekonomi yang rendah atau pembangunan ekonominya merata. Jika pembangunan ekonomi sangat timpang yang berarti ada propinsi yang kaya dan ada propinsi yang miskin maka wilayah tersebut tidak bisa dipastikan akan aman dan sejahtera. Hal ini karena kemiskinan disuatu tempat akan menjadi sebuah ancaman bagi kesejahteraan tempat lain yang diakibatkan penduduk daerah miskin akan melakukan tindakan kejahatan seperti pencurian, pembunuhan, teror guna memenuhi kebutuhan dan hasratnya. Jika tindakan kriminal sudah sering terjadi dimana-mana maka masyarakat sekitarnya akan was-was setiap waktu.

Dalam teori Kuznets yang terkenal dengan sebutan kurva U terbalik menemukan hubungan antara disparitas pembangunan ekonomi dengan pendapatan perkapita. Hubungan kedua indikator kinerja ekonomi tersebut menerangkan bahwa pada tahap awal pembangunan akan terwujud ketimpangan yang memburuk atau membesar dan selanjutnya pada tahap berikutnya ketimpangan tersebut akan berangsur menurun. Akan tetapai pada suatu saat nanti ketimpangan akan naik kembali dan seperti itu seterusnya sehingga terwujud peristiwa yang berulang-ulang.

Pada Tabel 4.6 dan Gambar 4.13 dapat dilihat hubungan antara pendapatan perkapita dan disparitas pembangunan ekonomi antar propinsi di Pulau Sumatera. Pada awal tahun pengamatan (tahun 2004) pendapatan perkapita Sumatera 7.869.419 rupiah dan disparitas yang terwujud 0,554 dan satu tahun setelah itu pendapatan perkapita Sumatera naik menjadi 8.024.201 rupiah dan disparitas yang terwujud menurun menjadi 0,553. Nilai ini menunjukkan bahwa dari tahun 2004 sampai 2005 hubungan pendapatan perkapita dan disparitas pembangunan ekonomi di Pulau Sumatera sesuai dengan teori kuznets yang menyebutkan bahwa pada tahap awal pembangunan akan terwujud ketimpangan yang memburuk yang kemudian pada tahap berikutnya ketimpangan tersebut akan berangsur menurun.

Tahap awal pembangunan ini terlihat bahwa pendapatan perkapita masih berkisar 7.869.419 rupiah kemudian tahun-tahun berikutnya selalu mengalami kenaikan dan diiringi oleh penurunan disparitas pembangunan ekonomi setiap tahunnya hingga akhir periode tahun 2012 di Pulau Sumatera. Nilai pendapatan perkapita dan nilai indeks Williamson yang terlihat pada Gambar 4.6 menunjukkan bahwa kurva trend tersebut cenderung berbentuk *nonlinier* negatif, dengan kata lain bahwa hubungan antara pendapatan perkapita dan disparitas pembangunan ekonomi di Pulau Sumatera adalah berhubungan negatif atau berbanding terbalik. Artinya bahwa apabila pendapatan perkapita naik maka disparitas pembangunan ekonomi di Pulau Sumatera cenderung menurun atau disparitas pembangunan ekonominya semakin merata seiring dengan kenaikan pendapatan perkapita.

Jika dibandingkan antara propinsi yang ada di Pulau Sumatera dengan propinsi lain yang ada di Indonesia maka hasil yang ditemukan adalah berbeda. Berdasarkan hasil penelitian ini, selama periode 2004-2012 di Pulau Sumatera ditemukan bahwa disparitas pembangunan ekonomi antar propinsi semakin menurun (dengan disparitas pembangunan ekonomi yang moderat) seiring dengan kenaikan pendapatan perkapita setiap tahunnya. Sedangkan menurut penelitian Soleh (2012) adalah selama periode 2000-2010 ditemukan bahwa disparitas pembangunan ekonomi antar propinsi di Indonesia sangat timpang dengan nilai

indeks Williamson antara 0,813 sampai 0,886, namun pendapatan perkapita yang dihasilkan naik setiap tahunnya. Artinya bahwa meskipun pendapatan perkapita naik setiap tahunnya tapi disparitas pembangunan ekonominya masih sangat timpang.

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan berdasarkan data yang sudah diolah dengan didukung oleh landasan teori maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. a. Selama periode pengamatan 2004-2012 secara rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita menyebabkan masing-masing propinsi tersebar di empat kuadran yang b e r b e d a - b e d a .
- b. Propinsi di Pulau Sumatera diklasifikasikan menjadi empat yaitu:
 - a. Propinsi yang termasuk sebagai propinsi yang cepat maju dan cepat tumbuh adalah Propinsi Kepulauan Riau.
 - b. Propinsi yang termasuk propinsi maju tapi tertekan adalah Propinsi Riau.
 - c. Propinsi dengan klasifikasi daerah yang berkembang cepat adalah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Lampung.

- d. Sedangkan propinsi yang relatif tertinggal adalah Propinsi Aceh dan Kepulauan Bangka Belitung.
2. Disparitas pembangunan antar propinsi di Pulau Sumatera selama periode 2004-2012 cenderung menurun yang berarti bahwa pembangunan antar propinsi setiap tahunnya semakin merata. Disparitas pembangunan ekonomi di Pulau Sumatera berada pada kondisi yang moderat atau disparitas pembangunan yang sedang dengan nilai indeks Williamson antara 0,455 sampai 0,553.
3. Selama periode pengamatan tahun 2004-2012 menunjukkan bahwa hubungan antara pendapatan perkapita dan disparitas pembangunan ekonomi di Pulau Sumatera adalah berhubungan negatif atau berbanding terbalik. Artinya bahwa apabila pendapatan perkapita naik maka disparitas pembangunan ekonomi di Pulau Sumatera cenderung menurun atau pembangunan ekonominya semakin merata seiring dengan kenaikan pendapatan perkapita

5.2. Saran

Berikut ini beberapa saran yang direkomendasikan oleh penulis berdasarkan hasil penelitian selama periode 2004-2012:

1. Perlu adanya beberapa cara pemerintah supaya masyarakat Propinsi Aceh dan Kepulauan Bangka Belitung bisa meningkatkan pendapatan perkapita untuk mengurangi ketertinggalan dibanding propinsi lain di Sumatera. Sehingga Propinsi Aceh dan Kepulauan Bangka Belitung yang relatif tertinggal menjadi propinsi berkembang cepat/propinsi maju tapi tertekan/propinsi cepat maju dan cepat tumbuh karena semakin lama akan semakin tumbuh propinsi lainnya dan tidak menutup kemungkinan Propinsi Aceh dan Kepulauan Bangka Belitung akan tinggal terus jika

masih lambat dalam aktivitas ekonominya. Seperti mendatangkan investor dari luar dan penambahan lapangan pekerjaan oleh pemerintah sendiri.

2. Dibutuhkan konsistensi serta komitmen seluruh gubernur yang ada di Pulau Sumatera untuk mensukseskan “Forum Koordinasi Antar Propinsi Se-Wilayah Sumatera” guna mewujudkan pembangunan yang merata di kawasan Pulau Sumatera.
3. Perlu upaya lebih oleh semua kalangan pada umumnya dan pemerintah pada khususnya agar tujuan pembangunan daerah sejalan antara tingkat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Seperti penambahan APBD, penyebaran pembangunan prasarana perhubungan, peranan perbankan untuk membiayai usaha masyarakat menengah kebawah, dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

Arsyad, Lincolin. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: BPFE

Aswandi, H dan Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga

Aswandi, H dan Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga

BAPEDA. 2005. *Bengkulu Dalam Angka*. Bengkulu: BPS

Badan Pusat Statistik. 2001-2010. *Statistik Indonesia Tahun*. Jakarta: BPS Indonesia

Badan Pusat Statistik. 2012. *Statistik Indonesia Tahun 2012*. Bengkulu: BPS Propinsi Bengkulu.

Badan Pusat Statistik. 2013. *Statistik Indonesia Tahun 2013*. Bengkulu: BPS Propinsi Bengkulu.

Budiyanto. 1993. *Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara Untuk Semua*. Jakarta: Erlangga.

Delis, Arman. 2009. *Analisis Ketimpangan Pendapatan Antar Wilayah Di Indonesia Periode 1990-2008*. Jakarta: LPFE-UNJA.

Dumairy. 1996. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.

Dwi, Ichwan. 2009. *Pulau Sumatera Dalam Kajian Geografi*. <http://one-geo.blogspot.com/2010/01/pulau-sumatera-dalam-kajiangeografi.html>. Diakses pada tanggal 24 Januari 2014.

http://atlasnasional.bakosurtanal.go.id/fisik_lingkungan/fisik_lingkungan_detail.php?id=2&judul=Sumatera. Diakses pada tanggal 24 Januari 2014.

<http://bps.go.id>. Diakses pada tanggal 05 November 2013.

http://id.wikipedia.org/wiki/Pemekaran_daerah_di_Indonesia#Kepulauan_Riau. Diakses pada tanggal 05 November 2013

<http://indonesiadata.co.id/main/index.php/provinsi>. Diakses pada tanggal 07 November 2013.

<http://kompas.com>. Diakses pada tanggal 05 Februari 2013.

<http://regionalinvestment.bkpm.go.id>. Diakses pada tanggal 07 November 2013.

<http://www.bappeda.bengkuluprov.go.id/berita/rapat-tindak-lanjut-forum-koordinasi-se-wilayah-sumatera-.php>. Diakses pada tanggal 03 Desember 2013.

Kuncoro, Mudrajad. 2012. *Perencanaan Daerah: Bagaimana Membangun Ekonomi Lokal, Kota dan Kawasan?* Jakarta: Selemba Empat.

Linpiati. 2010. *Analisis Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pembangunan di Propinsi Bengkulu dan Propinsi Sumatera Selatan*. Skripsi tidak diterbitkan. Bengkulu: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu.

Manurung, Haymens, Alder. 1995. *Ketimpangan Spasial dan Kemiskinan Di Indonesia*. Buletin Ilmiah Tarumanegara TH6/No21.

Purba, Marihot. 2004. *Analisis Disparitas Pembangunan Di Wilayah Barat Indonesia*. Skripsi tidak diterbitkan. Bengkulu: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu.

Sitanggang, Fransiska. 2013. *Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional di Propinsi Sumatera Utara*. Skripsi tidak diterbitkan. Bengkulu: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu.

Sjafrizal. 1997. *Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat*. LP3ES, 3, 27-28.

Sjafrizal. 2008. *Ekonomi Regional*. Padang-Sumatera Barat: Baduouse Media

Sjafrizal. 2012. *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Soleh, Ahmad. 2012. *Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kesenjangan Pembangunan Ekonomi Antar Regional di Indonesia Tahun 2001-2010*. Bengkulu. Tesis tidak diterbitkan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu.

- Sukirno, Sadono. 1998. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: LPFE-UI
- Sunoto. 2001. *Analisis Disparitas Pendapatan Inter Regional Antar Pulau Di Indonesia*. Bengkulu: Laporan penelitian Universitas Bengkulu.
- Todaro, dkk. 2007. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Todaro, M.P. 2013. *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Gelora Aksara Pratama
- Wijono, Wiloejo, Wiryono. 2005. “Mengungkap Sumber – Sumber Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Dalam Lima Tahun Terakhir”. *Jurnal Manajemen dan Fiskal*, Volume V, Nomor 2, Jakarta.

**Lampiran 1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Menurut Propinsi di Pulau Sumatera
(milyar rupiah) Tahun 2004-2012**

No	Propinsi	Produk Domestik Regional Bruto (Milyar Rupiah)								
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Aceh	40.374	36.288	36.854	35.983	34.098	32.219	33.103	34.789	36.600
2	Sumatera Utara	83.329	87.898	93.347	99.792	106.172	111.559	118.719	126.588	134.464
3	Sumatera Barat	27.578	29.159	30.950	32.913	35.177	36.683	38.862	41.292	43.912
4	Riau	75.217	79.288	83.371	86.213	91.085	93.786	97.736	102.666	106.309
5	Jambi	11.954	12.620	13.364	14.275	15.298	16.275	17.472	18.964	20.374
6	Sumatera Selatan	47.344	49.634	52.215	55.262	58.065	60.453	63.859	68.008	72.094
7	Bengkulu	5.896	6.239	6.611	7.037	7.442	7.860	8.340	8.878	9.464
8	Lampung	28.262	29.397	30.861	32.695	34.443	36.256	38.390	40.859	43.506
9	Kepulauan Bangka Belitung	8.415	8.707	9.054	9.465	9.900	10.270	10.885	11.588	12.251
10	Kepulauan Riau	28.509	30.382	32.441	34.714	37.015	38.319	41.076	43.810	47.405
	Sumatera	356.879	369.612	389.067	408.350	428.695	443.681	468.441	497.441	526.378

Lampiran 2. Jumlah Penduduk Menurut Propinsi di Pulau Sumatera Tahun 2004-2012

No	Propinsi	Jumlah Penduduk (Pi)									
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Rata-rata
1	Aceh	4.089.086	4.031.589	4.153.578	4.223.814	4.295.485	4.368.637	4.494.410	4.597.308	4.693.934	4.327.538
2	Sumatera Utara	12.123.361	12.450.911	12.625.946	12.834.359	13.042.326	13.248.370	12.982.204	13.103.596	13.215.401	12.847.386
3	Sumatera Barat	4.535.456	4.566.126	4.632.532	4.697.826	4.786.067	4.856.906	4.846.909	4.904.460	4.957.719	4.753.778
4	Riau	4.519.606	4.579.219	4.952.999	5.071.010	5.189.163	5.309.757	5.538.367	5.738.543	5.929.172	5.203.093
5	Jambi	2.625.318	2.635.968	2.696.181	2.742.217	2.788.257	2.834.261	3.092.265	3.169.814	3.242.814	2.869.677
6	Sumatera Selatan	6.628.416	6.782.339	6.917.890	7.019.996	7.121.799	7.223.437	7.450.394	7.580.320	7.701.528	7.158.458
7	Bengkulu	1.549.147	1.581.524	1.591.389	1.616.716	1.655.360	1.719.205	1.715.518	1.742.080	1.766.794	1.659.748
8	Lampung	7.063.751	7.116.177	7.188.428	7.289.830	7.397.266	7.504.483	7.608.405	7.691.007	7.767.312	7.402.962
9	Kepulauan Bangka Belitung	1.023.793	1.043.456	1.090.698	1.106.705	1.123.715	1.141.249	1.223.296	1.261.737	1.298.168	1.145.869
10	Kepulauan Riau	1.192.045	1.274.848	1.334.900	1.392.898	1.452.812	1.515.177	1.679.163	1.764.766	1.847.478	1.494.899
Sumatera (P)		45.349.979	46.062.157	47.184.541	47.995.371	48.852.250	49.721.482	50.630.931	51.553.631	52.420.320	48.863.407
Indonesia		217.197.832	218.915.033	222.993.992	225.849.824	230.810.506	234.274.282	237.661.326	241.037.751	244.215.984	230.328.503

**Lampiran 3. Pendapatan Perkapita Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Menurut Propinsi di Pulau Sumatera
Tahun 2004-2012**

No	Propinsi	Produk Domestik Regional Bruto Perkapita (Yi)									
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Rata-Rata
1	Aceh	9.873.600	9.000.918	8.872.832	8.519.078	7.938.102	7.375.069	7.365.372	7.567.255	7.797.298	8.256.614
2	Sumatera Utara	6.873.424	7.059.564	7.393.268	7.775.379	8.140.572	8.420.583	9.144.749	9.660.554	10.174.795	8.293.654
3	Sumatera Barat	6.080.535	6.385.939	6.681.012	7.006.007	7.349.876	7.552.751	8.017.893	8.419.276	8.857.299	7.372.287
4	Riau	16.642.380	17.314.743	16.832.428	17.001.150	17.552.927	17.662.955	17.647.079	17.890.604	17.929.822	17.386.010
5	Jambi	4.553.353	4.787.615	4.956.641	5.205.642	5.486.582	5.742.238	5.650.227	5.982.685	6.282.815	5.405.311
6	Sumatera Selatan	7.142.581	7.318.124	7.547.822	7.872.084	8.153.137	8.369.008	8.571.225	8.971.653	9.361.000	8.145.181
7	Bengkulu	3.805.965	3.944.929	4.154.233	4.352.651	4.495.699	4.571.881	4.861.505	5.096.207	5.356.595	4.515.518
8	Lampung	4.000.990	4.131.010	4.293.150	4.485.015	4.656.180	4.831.246	5.045.736	5.312.568	5.601.165	4.706.340
9	Kepulauan Bangka Belitung	8.219.435	8.344.386	8.301.106	8.552.415	8.810.063	8.998.913	8.898.092	9.184.164	9.437.145	8.749.524
10	Kepulauan Riau	23.916.043	23.831.861	24.302.195	24.922.141	25.478.176	25.290.115	24.462.187	24.824.821	25.659.304	24.742.983
Sumatera (Y)		7.869.419	8.024.201	8.245.667	8.508.091	8.775.338	8.923.306	9.252.091	9.649.020	10.041.507	8.809.849
Indonesia		7.385.139	7.721.312	7.973.085	8.318.470	8.663.141	8.939.591	9.347.713	9.807.900	10.290.000	8.705.150

Lampiran 4. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Propinsi di Pulau Sumatera Tahun 2005-2012

No	Propinsi	Tingkat Pertumbuhan PDRB (Ri)								
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Rata-Rata
1	Aceh	-10,12	1,56	-2,36	-5,24	-5,51	2,74	5,09	5,21	-1,08
2	Sumatera Utara	5,48	6,20	6,90	6,39	5,07	6,42	6,63	6,22	6,17
3	Sumatera Barat	5,73	6,14	6,34	6,88	4,28	5,94	6,25	6,35	5,99
4	Riau	5,41	5,15	3,41	5,65	2,97	4,21	5,04	3,55	4,42
5	Jambi	5,57	5,90	6,82	7,17	6,39	7,35	8,54	7,44	6,90
6	Sumatera Selatan	4,84	5,20	5,84	5,07	4,11	5,63	6,50	6,01	5,40
7	Bengkulu	5,82	5,96	6,44	5,76	5,62	6,11	6,45	6,60	6,05
8	Lampung	4,02	4,98	5,94	5,35	5,26	5,89	6,43	6,48	5,54
9	Kepulauan Bangka Belitung	3,47	3,99	4,54	4,60	3,74	5,99	6,46	5,72	4,81
10	Kepulauan Riau	6,57	6,78	7,01	6,63	3,52	7,19	6,66	8,21	6,57
Sumatera (R)		3,57	5,26	4,96	4,98	3,50	5,58	6,19	5,82	5,08
Indonesia		5,38	5,18	5,67	6,47	4,74	6,08	6,50	6,23	6,19

Lampiran 5. Klasifikasi Propinsi Di Pulau Sumatera

Klasifikasi	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Daera Cepat Maju Cepat Tumbuh ($Y_i > Y$ & $R_i > R$)	Riau	Kepulauan Riau	Kepulauan Riau	Riau	Kepulauan Riau	Kepulauan Riau	Sumatera Utara	Sumatera Utara
	Kepulauan Riau			Kepulauan Riau			Kepulauan Riau	
Daerah Berkembang Cepat ($Y_i < Y$ & $R_i > R$)	Sumatera Utara	Sumatera Utara	Sumatera Utara	Sumatera Utara	Sumatera Utara	Sumatera Utara	Sumatera Barat	Sumatera Barat
	Sumatera Barat	Sumatera Barat	Sumatera Barat	Sumatera Barat	Sumatera Barat	Sumatera Barat	Jambi	Jambi
	Jambi		Jambi	Jambi	Jambi	Jambi	Sumatera Selatan	Sumatera Selatan
	Sumatera Selatan	Jambi	Sumatera Selatan	Sumatera Selatan	Sumatera Selatan	Sumatera Selatan	Bengkulu	Bengkulu
	Bengkulu		Bengkulu	Bengkulu	Bengkulu	Bengkulu	Lampung	
	Lampung	Bengkulu	Lampung	Lampung	Lampung	Lampung	Lampung Kepulauan Bangka Belitung	Kepulauan Bangka Belitung
Daerah Maju Tapi Tertekan ($Y_i > Y$ & $R_i < R$)	Aceh	Aceh	Aceh	Kepulauan Bangka Belitung	Riau	Riau	Riau	Riau
	Kepulauan Bangka Belitung	Riau	Riau		Kepulauan Bangka Belitung			
	Kepulauan Bangka Belitung	Kepulauan Bangka Belitung						
Daerah Relatif Tertinggal ($Y_i < Y$ & $R_i < R$)		Lampung		Aceh	Aceh	Aceh	Aceh	Aceh
		Sumatera Selatan						Kepulauan Bangka Belitung

Lapiran 6. Hasil Perhitungan Indeks Williamson Pulau Sumatera Tahun 2004-2012

No	Propinsi	$((Y_i - Y)^2) * (P_i/P)$				
		2004	2005	2006	2007	2008
1	Aceh	362.178.741.515	83.496.669.719	34.624.754.540	10.622.338	61.634.352.022
2	Sumatera Utara	265.192.085.232	251.527.102.747	194.424.050.832	143.562.937.393	107.571.440.838
3	Sumatera Barat	320.042.946.664	266.054.438.055	240.356.546.193	220.844.421.270	199.069.758.310
4	Riau	7.670.361.684.646	8.580.829.149.131	7.739.756.583.753	7.621.199.469.173	8.183.955.321.289
5	Jambi	636.577.369.540	599.473.682.623	618.135.915.224	623.124.448.191	617.321.736.150
6	Sumatera Selatan	77.216.114.961	73.407.221.753	71.398.969.998	59.164.528.102	56.437.395.032
7	Bengkulu	564.035.186.652	571.342.855.336	564.582.943.079	581.659.132.381	620.614.861.470
8	Lampung	2.330.920.856.412	2.341.605.933.058	2.380.025.534.882	2.458.297.849.534	2.569.233.631.445
9	Kepulauan Bangka Belitung	2.765.731.872	2.322.379.257	71.046.697	45.299.777	27.737.054
10	Kepulauan Riau	6.768.351.745.748	6.915.909.498.301	7.293.773.800.187	7.819.003.989.269	8.296.700.207.042
$\sum((Y_i - Y)^2) * (P_i/P)$		18.997.642.463.242	19.685.968.929.980	19.137.150.145.385	19.526.912.697.428	20.712.566.440.654
$\sqrt{\sum((Y_i - Y)^2) * (P_i/P)}$		4.358.629	4.436.887	4.374.603	4.418.927	4.551.106
Tahun	2004	2005	2006	2007	2008	
IW	0,554	0,553	0,531	0,519	0,519	

No	Propinsi	$((Y_i - Y)^2) * (P_i/P)$			
		2009	2010	2011	2012
1	Aceh	210.608.893.159	315.988.701.509	386.462.883.359	450.986.992.046
2	Sumatera Utara	67.340.422.376	2.954.425.705	33.816.918	4.478.844.815
3	Sumatera Barat	183.488.479.724	145.820.494.052	143.867.095.839	132.628.851.919
4	Riau	8.156.776.830.922	7.709.140.105.902	7.560.731.018.756	7.038.221.311.993
5	Jambi	576.821.987.197	792.347.040.916	826.491.962.328	873.968.615.254
6	Sumatera Selatan	44.636.171.003	68.216.222.647	67.464.615.732	68.036.626.846
7	Bengkulu	654.706.555.648	653.167.158.161	700.435.955.948	739.756.989.574
8	Lampung	2.527.323.311.940	2.658.824.754.105	2.805.387.839.099	2.921.485.863.606
9	Kepulauan Bangka Belitung	131.206.513	3.027.759.230	5.288.654.166	9.045.339.332
10	Kepulauan Riau	8.162.953.289.829	7.672.569.926.890	7.883.718.921.409	8.596.450.695.841
$\sum((Y_i - Y)^2) * (P_i/P)$		20.584.787.148.312	20.022.056.589.118	20.379.882.763.554	20.835.060.131.225

$\sqrt{\sum((Y_i - Y)^2) * (P_i/P)}$	4.537.046	4.474.601	4.514.408	4.564.544
--------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Tahun	2009	2010	2011	2012
IW	0,508	0,484	0,468	0,455